

BAB III

PROSEDUR PENELITIAN

A. PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif, yang menurut Creswell (2014) ditandai dengan fleksibilitas, fokus pada konteks, dan interpretasi mendalam terhadap fenomena sosial. Pendekatan ini dipilih karena sifat kompleks dari manajemen penganggaran pendidikan nasional, yang melibatkan kebijakan publik, proses pengambilan keputusan, dan tantangan implementasi yang tidak dapat sepenuhnya diukur secara kuantitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali persepsi pemangku kepentingan dan memahami konteks kebijakan secara mendalam.

Untuk memperkuat analisis, pendekatan ini dilengkapi dengan data sekunder dari dokumen resmi, seperti APBN, Laporan Bappenas dan Laporan Kementerian Keuangan, yang memberikan data akurat dan konsisten tentang alokasi anggaran. Data sekunder ini diintegrasikan dengan data primer melalui triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus karena pendekatannya memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap alokasi dan pengelolaan 20% anggaran pendidikan dalam APBN. Metode studi kasus sangat efektif digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa dalam konteks penelitian kebijakan atau fenomena sosial yang kompleks.

Metode studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam manajemen penganggaran pendidikan nasional dengan fokus pada alokasi 20% anggaran pendidikan dalam APBN periode 2015-2019. Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk menggambarkan fenomena kebijakan yang kompleks dalam konteks nyata, dengan memadukan data dari dokumen resmi, wawancara, dan observasi.

Penelitian ini berfokus pada analisis praktik manajemen penganggaran pendidikan, yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Aspek-aspek tersebut dianalisis berdasarkan kerangka fungsi manajemen klasik untuk memastikan relevansi dengan teori manajemen keuangan publik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana manajemen penganggaran diterapkan dan dievaluasi selama periode tersebut. Studi kasus bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan komprehensif, sehingga hasilnya dapat memberikan wawasan yang kaya dan kontekstual terkait manajemen penganggaran pendidikan.

Penggunaan metode studi kasus mendukung pengintegrasian berbagai sumber data, seperti dokumen APBN, laporan evaluasi pendidikan, serta wawancara dengan pemangku kepentingan. Metode ini memfasilitasi triangulasi data untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Metode studi kasus memberikan fleksibilitas untuk menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif, yang penting dalam menggambarkan kompleksitas pengelolaan anggaran pendidikan di tingkat nasional.

B. TEKNIK DAN INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian dengan judul “Manajemen Penganggaran Alokasi 20% Dana Pendidikan dalam APBN Tahun Anggaran 2015-2019” ini menggunakan teknik

pengumpulan data berupa: studi dokumentasi, wawancara, dan observasi.

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis dokumen resmi, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), laporan keuangan pemerintah, laporan kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Teknik ini penting untuk mengidentifikasi pola alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan dalam periode penelitian. Studi dokumentasi memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat valid dan akurat karena bersumber dari dokumen resmi.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu teknik pengumpulan data yang menggabungkan elemen wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam metode ini, peneliti menggunakan panduan wawancara yang berisi daftar pertanyaan atau topik utama yang akan dibahas, tetapi memberikan fleksibilitas kepada pewawancara untuk mengeksplorasi informasi lebih dalam sesuai dengan respons narasumber. Teknik ini memungkinkan dialog yang dinamis sehingga narasumber dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan luas sesuai dengan pengalaman atau pandangannya.

Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali perspektif dari para pemangku kepentingan, seperti pejabat Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, akademisi, serta lembaga pengawas anggaran. Teknik ini fleksibel dan memungkinkan eksplorasi lebih dalam terhadap isu-isu yang relevan dengan pengelolaan anggaran. Wawancara semi-terstruktur sangat efektif untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan

memahami pengalaman langsung narasumber terkait topik penelitian.

c. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi tidak langsung. Observasi tidak langsung dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder dan laporan hasil alokasi anggaran dari lembaga terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Teknik ini membantu peneliti memahami konteks manajemen penganggaran pendidikan nasional tanpa harus hadir langsung di lokasi penelitian. Observasi tidak langsung dapat digunakan sebagai pelengkap data dokumentasi untuk memastikan akurasi dan konsistensi informasi.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian di antaranya melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dalam penelitian studi kasus tentang manajemen penganggaran 20% Dana Pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada periode 2015-2019, terdapat tiga instrumen utama pengumpulan data, yaitu dokumentasi, wawancara, dan observasi.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang akan diteliti. Instrumen yang dapat digunakan meliputi: Rencana Strategis (Renstra) Kemdikbud Periode 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) (Kode D1); Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Keuangan APBN Kemdikbud tahun 2015-2019, Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Neraca Pendidikan Daerah (Kode: D2); Dokumen Peraturan dan Kebijakan (UU, PP, Perpres, Permendikbud, dan Keputusan Menteri) terkait pengalokasian 20% Dana Pendidikan (Kode D3).

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan perspektif dari para pemangku kepentingan terkait kebijakan dan implementasi penganggaran. Instrumen yang digunakan meliputi: Pedoman wawancara semi-terstruktur dengan daftar pertanyaan. Narasumber yaitu: Asisten Staf Khusus Mendikbud Periode 2015-2019, Staf Khusus Kementerian Keuangan, dan Staf Bappenas (Kode: W1), Tenaga Ahli DPR RI (Kode: W2), dan Akademisi atau peneliti kebijakan pendidikan dan anggaran publik (Kode: W3).

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data empiris mengenai implementasi anggaran pendidikan di lapangan. Instrumen yang digunakan meliputi: Checklist observasi terkait dokumen penganggaran 20% dana pendidikan (Kode: CL1). Catatan lapangan mengenai temuan terkait efektivitas dan kendala dalam implementasi anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia (CL.2).

Kisi-kisi menjadi pedoman untuk melakukan pengumpulan dokumentasi, wawancara, dan observasi.

a. Kisi-Kisi Penelitian

Kisi-kisi untuk penelitian dengan judul Manajemen Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI), diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3 Kisi-Kisi Penelitian

No.	Fokus Penelitian	Indikator	Sumber		
			D	W	O
1	Perencanaan Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI)	a. Penyusunan RAPBN	✓	✓	
		b. Penyusunan RKA Kementerian			
		c. Penetapan Prioritas dan Kebutuhan Sektor Pendidikan			
		d. Penyusunan dan Penetapan Alokasi Dana Pendidikan			

		e. Pengawasan dan Evaluasi Penggunaan Dana Pendidikan			
2	Pengorganisasian Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI)	a. Penetapan Struktur Organisasi b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab c. Penyusunan Pedoman Operasional d. Penetapan Mekanisme Koordinasi e. Penyesuaian Alokasi Dana Pendidikan f. Pengelolaan dan Penyaluran Dana g. Monitoring dan Pengawasan Organisasi Pengelola	✓		
3	Pelaksanaan Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI).	a. Penetapan Alokasi Anggaran Pendidikan (APBN dan APBD) b. Penyaluran Dana Pendidikan c. Pelaksanaan Program Pendidikan	✓		✓
4	Pengawasan Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI) .	a. Pengawasan dan Monitoring Penggunaan Anggaran b. Tahap Evaluasi dan Pelaporan	✓		✓
5	Kendala yang dihadapi dalam Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI).	a. Kendala dari internal pemerintah b. Kendala di lapangan.	✓	✓	
6	Solusi masalah Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI) .	a. Solusi dari Pemerintah Pusat b. Solusi dari Pemerintah Daerah	✓	✓	

7	Dampak Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI)	Dampak Penganggaran Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia	☒	☒	
---	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Tabel 4 Pedoman Studi Dokumen

No.	Fokus Penelitian	Indikator	Studi Dokumen
1	Perencanaan Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI)	a. Penyusunan (RAPBN	Dokumen Peraturan dan Kebijakan (UU, PP, Perpres, Permendikbud, dan Keputusan Menteri) terkait pengalokasian 20% Dana Pendidikan (Kode D3). Rencana Strategis (Renstra) Kemdikbud Periode 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) (Kode D1)
		b. Penyusunan RKA Kementerian	
		c. Penetapan Prioritas dan Kebutuhan Sektor Pendidikan	
		d. Penyusunan dan Penetapan Alokasi Dana Pendidikan	
		e. Pengawasan dan Evaluasi Penggunaan Dana Pendidikan	
2	Pengorganisasian Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI)	a. Penetapan Struktur Organisasi	Rencana Strategis (Renstra) Kemdikbud Periode 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) (Kode D1); Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Keuangan APBN Kemdikbud tahun 2015-2019, Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Neraca Pendidikan Daerah (Kode: D2); Dokumen Peraturan dan Kebijakan (UU, PP, Perpres, Permendikbud, dan Keputusan Menteri) terkait pengalokasian 20% Dana Pendidikan (Kode D3)
		b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab	
		c. Penyusunan Pedoman Operasional	
		d. Penetapan Mekanisme Koordinasi	
		e. Penyesuaian Alokasi Dana Pendidikan	
		f. Pengelolaan dan Penyaluran Dana	
		g. Monitoring dan Pengawasan Organisasi Pengelola	

3	Pelaksanaan Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI).	a. Penetapan Alokasi Anggaran Pendidikan (APBN dan APBD)	Rencana Strategis (Renstra) Kemdikbud Periode 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) (Kode D1); Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Keuangan APBN Kemdikbud tahun 2015-2019, Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Neraca Pendidikan Daerah (Kode: D2); Dokumen Peraturan dan Kebijakan (UU, PP, Perpres, Permendikbud, dan Keputusan Menteri) terkait pengalokasian 20% Dana Pendidikan (Kode D3)
		b. Penyaluran Dana Pendidikan	
		c. Pelaksanaan Program Pendidikan	
4	Pengawasan Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI) .	a. Pengawasan dan Monitoring Penggunaan Anggaran	Rencana Strategis (Renstra) Kemdikbud Periode 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) (Kode D1); Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Keuangan APBN Kemdikbud tahun 2015-2019, Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Neraca Pendidikan Daerah (Kode: D2); Dokumen Peraturan dan Kebijakan (UU, PP, Perpres, Permendikbud, dan Keputusan Menteri) terkait pengalokasian 20% Dana Pendidikan (Kode D3)
		b. Tahap Evaluasi dan Pelaporan	
5	Kendala yang dihadapi dalam Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan	c. Kendala dari internal pemerintah	Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Keuangan APBN Kemdikbud tahun 2015-2019, Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan
		d. Kendala di lapangan.	

	20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI).		Neraca Pendidikan Daerah (Kode: D2); Dokumen Peraturan dan Kebijakan (UU, PP, Perpres, Permendikbud, dan Keputusan Menteri) terkait pengalokasian 20% Dana Pendidikan (Kode D3)
6	Solusi masalah Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI) .	c. Solusi dari Pemerintah Pusat	Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Keuangan APBN Kemdikbud tahun 2015-2019, Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Neraca Pendidikan Daerah (Kode: D2); Dokumen Peraturan dan Kebijakan (UU, PP, Perpres, Permendikbud, dan Keputusan Menteri) terkait pengalokasian 20% Dana Pendidikan (Kode D3)
		d. Solusi dari Pemerintah Daerah	
7	Dampak Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI)	Dampak Penganggaran Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia	Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Keuangan APBN Kemdikbud tahun 2015-2019, Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Neraca Pendidikan Daerah (Kode: D2); Dokumen Peraturan dan Kebijakan (UU, PP, Perpres, Permendikbud, dan Keputusan Menteri) terkait pengalokasian 20% Dana Pendidikan (Kode D3)

Tabel 5 Pedoman Wawancara

No.	Fokus Penelitian	Indikator	Wawancara
1	Perencanaan Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan	a. Penyusunan RAPBN	Asisten Staf Khusus Mendikbud Periode 2015-2019, Staf Khusus Kementerian
		b. Penyusunan RKA Kementerian	

	Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI)	c. Penetapan Prioritas dan Kebutuhan Sektor Pendidikan d. Penyusunan dan Penetapan Alokasi Dana Pendidikan e. Pengawasan dan Evaluasi Penggunaan Dana Pendidikan	Keuangan, dan Staf Bappenas (Kode: W1), Tenaga Ahli DPR RI (Kode: W2), dan Akademisi atau peneliti kebijakan pendidikan dan anggaran publik (Kode: W3). Asisten Staf Khusus Mendikbud Periode 2015-2019, Staf Khusus Kementerian Keuangan, dan Staf Bappenas (Kode: W1), Tenaga Ahli DPR RI (Kode: W2), dan Akademisi atau peneliti kebijakan pendidikan dan anggaran publik (Kode: W3).
2	Pengorganisasian Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI)	a. Penetapan Struktur Organisasi b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab c. Penyusunan Pedoman Operasional d. Penetapan Mekanisme Koordinasi e. Penyesuaian Alokasi Dana Pendidikan f. Pengelolaan dan Penyaluran Dana g. Monitoring dan Pengawasan Organisasi Pengelola	
3	Pelaksanaan Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI).	a. Penetapan Alokasi Anggaran Pendidikan (APBN dan APBD) b. Penyaluran Dana Pendidikan c. Pelaksanaan Program Pendidikan	
4	Pengawasan Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI) .	a. Pengawasan dan Monitoring Penggunaan Anggaran b. Tahap Evaluasi dan Pelaporan	

5	Kendala yang dihadapi dalam Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI).	a. Kendala dari intenat pemerintah	
		b. Kendala di lapangan.	
6	Solusi masalah masalah Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI) .	a. Solusi dari Pemerintah Pusat	Asisten Staf Khusus Mendikbud Periode 2015-2019, Staf Khusus Kementerian Keuangan, dan Staf Bappenas (Kode: W1), Tenaga Ahli DPR RI (Kode: W2), dan Akademisi atau peneliti kebijakan pendidikan dan anggaran publik (Kode: W3).
		b. Solusi dari Pemerintah Daerah	
7	Dampak Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI)	Dampak Penganggaran Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia	Asisten Staf Khusus Mendikbud Periode 2015-2019, Staf Khusus Kementerian Keuangan, dan Staf Bappenas (Kode: W1), Tenaga Ahli DPR RI (Kode: W2), dan Akademisi atau peneliti kebijakan pendidikan dan anggaran publik (Kode: W3).

Tabel 6 Pedoman Observasi

No.	Fokus Penelitian	Indikator	Observasi
1	Perencanaan Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI)	a. Penyusunan RAPBN	Checklist observasi terkait dokumen penganggaran 20% dana pendidikan (Kode: CL1). Catatan lapangan mengenai temuan terkait efektivitas dan kendala dalam implementasi anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di Indoensia (CL.2).
		b. Penyusunan RKA Kementerian	
		c. Penetapan Prioritas dan Kebutuhan Sektor Pendidikan	
		d. Penyusunan dan Penetapan Alokasi Dana Pendidikan	
		e. Pengawasan dan Evaluasi	

		Penggunaan Dana Pendidikan	
2	Pengorganisasian Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI)	a. Penetapan Struktur Organisasi b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab c. Penyusunan Pedoman Operasional d. Penetapan Mekanisme Koordinasi e. Penyesuaian Alokasi Dana Pendidikan f. Pengelolaan dan Penyaluran Dana g. Monitoring dan Pengawasan Organisasi Pengelola	
3	Pelaksanaan Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI).	a. Penetapan Alokasi Anggaran Pendidikan (APBN dan APBD) b. Penyaluran Dana Pendidikan c. Pelaksanaan Program Pendidikan	
4	Pengawasan Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI).	a. Pengawasan dan Monitoring Penggunaan Anggaran b. Tahap Evaluasi dan Pelaporan	
5	Kendala yang dihadapi dalam Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI).	a. Kendala dari internal pemerintah b. Kendala di lapangan.	

6	Solusi masalah Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI) .	a. Solusi dari Pemerintah Pusat	
		b. Solusi dari Pemerintah Daerah	
7	Dampak Penganggaran Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN Periode 2015-2019 di Kemdikbud RI)	Dampak Penganggaran Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia	

C. LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian manajemen penganggaran pendidikan nasional yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sumber utama yaitu laman atau link yang dikelola oleh pemerintah pusat, khususnya Kemdikbud dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi anggaran negara. Penelitian ini berfokus pada penganggaran sektor pendidikan yang tercantum dalam APBN selama periode 2015-2019 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menjadi pengguna utama dana tersebut.

Berikutnya juga adalah laman atau link dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai lembaga yang menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan menengah nasional, serta Badan Pengawasan Keuangan (BPK) yang melakukan audit terhadap penggunaan anggaran. Dengan demikian, tempat penelitian ini mencakup pusat-pusat data pemerintahan yang terkait dengan pengelolaan anggaran negara dan dokumen-dokumen anggaran yang

dipublikasikan oleh lembaga-lembaga tersebut, yang menjadi sumber utama data untuk menganalisis alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini mencakup tiga kelompok pemangku kepentingan yang relevan dengan manajemen penganggaran pendidikan nasional periode 2015-2019. Subjek-subjek tersebut dipilih berdasarkan kriteria keahlian, posisi strategis, dan keterlibatan langsung dalam penganggaran pendidikan, untuk memastikan keragaman perspektif. Kelompok ini berkontribusi pada triangulasi data, di mana pejabat memberikan wawasan operasional, lembaga pengawasan menyediakan data audit, dan akademisi menawarkan analisis kontekstual.

a. Pejabat Pemerintah yang Terlibat dalam Penganggaran

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai penerima utama dana pendidikan dalam APBN, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan implementasi kebijakan pendidikan di tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang berperan dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah (5 tahun) dan panjang (20 tahun) di tingkat nasional yang terkait dengan sektor pendidikan. Kementerian Keuangan yang berperan dalam menentukan pagu indikatif yang disediakan untuk pendidikan.

b. Lembaga Pengawasan

Badan Pengawasan Keuangan (BPK) yang melakukan audit terhadap penggunaan anggaran, memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang juga terlibat dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Inspektorat Jendral

merupakan lembaga internal kementerian pendidikan dan kebudayaan yang berperan memastikan anggaran pendidikan di kementerian dapat sesuai dengan rencana dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pihak Akademisi dan Peneliti

Akademisi atau peneliti yang memiliki kepentingan untuk mengkaji efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran pendidikan, serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.

D. LANGKAH-LANGKAH PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data merupakan tahap krusial dalam penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi manajemen penganggaran pendidikan nasional, khususnya dalam alokasi 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini melibatkan berbagai metode dan pendekatan guna memperoleh informasi yang valid, relevan, dan komprehensif. Dalam konteks penelitian ini, proses pengumpulan data mencakup penelusuran dokumen resmi, analisis laporan keuangan pemerintah, wawancara dengan pemangku kebijakan, seperti Kementerian Pendidikan. Dengan langkah-langkah yang terstruktur, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai implementasi alokasi anggaran pendidikan, efektivitas penggunaannya, serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai target pembangunan sektor pendidikan.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang secara sistematis melalui tiga tahap: orientasi, eksplorasi, dan member check. Tahap orientasi bertujuan untuk membangun pemahaman awal tentang konteks kebijakan penganggaran pendidikan dan mengidentifikasi kebutuhan data. Tahap eksplorasi fokus pada pengumpulan data primer dan sekunder secara mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tahap member check bertujuan untuk memverifikasi keakuratan data dengan melibatkan narasumber dalam validasi temuan awal. Ketiga tahap ini saling terkait untuk memastikan

data yang dikumpulkan relevan, valid, dan komprehensif dalam menggambarkan manajemen penganggaran pendidikan nasional.

Tahapan dalam pengumpulan data diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Orientasi

Tahap orientasi merupakan langkah awal yang bertujuan untuk memahami latar belakang dan konteks penelitian terkait alokasi 20% dari APBN untuk sektor pendidikan. Pada tahap ini, peneliti melakukan identifikasi kebutuhan data berdasarkan tujuan penelitian. Aktivitas utama meliputi:

- a. Studi literatur untuk memahami kebijakan alokasi anggaran pendidikan.
- b. Peninjauan dokumen resmi seperti UU APBN, laporan tahunan Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendidikan.
- c. Pengumpulan informasi awal terkait implementasi kebijakan, efektivitas, dan tantangan yang mungkin dihadapi.
- d. Penentuan sumber data utama, baik primer (wawancara, diskusi kelompok terarah) maupun sekunder (laporan pemerintah, publikasi resmi).

2. Tahap Eksplorasi

Pada tahap eksplorasi, peneliti mulai mengumpulkan data secara lebih mendalam untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif. Aktivitas yang dilakukan meliputi:

- a. Wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, seperti: Kementerian Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan DPR.
- b. Diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) dengan ahli pendidikan, praktisi keuangan, dan masyarakat sipil untuk menggali perspektif mengenai efektivitas alokasi anggaran.
- c. Analisis dokumen dan data sekunder, termasuk laporan BPS, audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

- d. Pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi pemanfaatan anggaran, distribusi dana ke daerah, serta pengaruhnya terhadap indikator pendidikan nasional.

3. Tahap *Member Check*

Tahap *member check* merupakan langkah verifikasi untuk memastikan keakuratan dan validitas data yang telah dikumpulkan. Aktivitas dalam tahap ini meliputi:

- a. Memperoleh umpan balik dari narasumber utama terkait interpretasi data dan kesimpulan sementara.
- b. Menyelaraskan temuan dengan dokumen resmi dan sumber-sumber sekunder untuk memastikan konsistensi.
- c. Melakukan revisi atau klarifikasi data jika terdapat ketidaksesuaian atau informasi yang tidak valid.
- d. Penyusunan laporan sementara yang mencakup analisis awal dan menyajikannya kepada pemangku kepentingan untuk memastikan kesesuaian dengan realitas kebijakan yang ada.

E. ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten. Analisis konten, sebagaimana didefinisikan oleh Krippendorff (2018), dipilih untuk menginterpretasikan data dokumen dan wawancara secara sistematis, memungkinkan identifikasi pola yang relevan dengan manajemen penganggaran pendidikan. Analisis konten dipilih karena kemampuannya untuk menganalisis dokumen resmi, seperti APBN dan laporan BPK, serta transkrip wawancara, untuk mengungkap pola alokasi, distribusi, dan efektivitas anggaran pendidikan. Teknik yang digunakan, sebagai berikut.

1. Pengumpulan Data

Tahap ini melibatkan aktivitas pengumpulan informasi dari berbagai sumber, baik data primer maupun sekunder. Peneliti mengumpulkan data melalui dokumen, wawancara, dan observasi. Data yang diperoleh lengkap dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan, pemilihan, dan pengorganisasian data mentah menjadi informasi yang lebih terfokus. Pada tahap ini, data yang tidak relevan dihilangkan, sedangkan data penting dirangkum atau dikategorikan sesuai dengan tema penelitian. Reduksi data membantu peneliti untuk menyoroti aspek utama yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian.

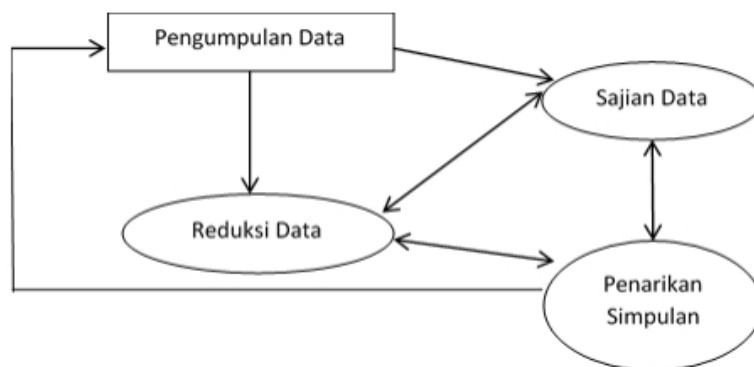
3. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk yang terstruktur, seperti tabel, grafik, diagram, atau narasi, sehingga dapat memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan. Penyajian data memberikan gambaran secara menyeluruh dan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola atau hubungan tertentu.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan awal yang muncul diverifikasi melalui triangulasi data, diskusi dengan narasumber, atau perbandingan dengan literatur sebelumnya untuk memastikan keakuratan dan validitas temuan. Proses verifikasi ini penting agar hasil penelitian dapat dipercaya dan sesuai dengan realitas.

Teknik analisis data menekankan proses yang sistematis, interaktif, dan mendalam untuk memastikan kualitas temuan penelitian kualitatif. Analisis data merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus menerus, tampak dalam gambar berikut:



Gambar 6 Tahapan Analisis Data

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tahap pertama adalah pengumpulan data, di mana data diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen resmi (APBN, laporan keuangan, dan audit BPK), wawancara dengan pemangku kebijakan, dan data statistik pendidikan dari BPS. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif terkait implementasi dan efektivitas alokasi anggaran pendidikan.

Tahap kedua adalah reduksi data, yaitu proses penyaringan dan penyederhanaan data untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dan signifikan. Dalam tahap ini, data yang tidak relevan atau redundan dieliminasi, sementara informasi kunci, seperti rincian alokasi anggaran, distribusi ke daerah, dan pengaruhnya terhadap indikator pendidikan, dirangkum untuk memudahkan analisis lebih lanjut.

Tahap ketiga adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun dalam format yang terstruktur, seperti tabel, diagram, atau narasi, untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pola alokasi anggaran dan implementasinya. Penyajian ini memudahkan peneliti dan pemangku kebijakan untuk memahami temuan utama.

Tahap keempat adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana data yang telah dianalisis digunakan untuk merumuskan temuan utama mengenai efektivitas alokasi 20% anggaran pendidikan dalam APBN.

Kesimpulan yang diperoleh diverifikasi dengan melakukan triangulasi data, membandingkan hasil wawancara, dokumen resmi, dan data statistik untuk memastikan keakuratan dan validitas temuan. Proses ini memastikan bahwa hasil penelitian memberikan gambaran yang mendalam dan terpercaya mengenai pengelolaan anggaran pendidikan nasional.

F. KEABSAHAN DATA HASIL PENELITIAN

Agar hasil penelitian ini dapat diterima sebagai suatu karya ilmiah yang memiliki kredibilitas (dapat dipercaya), maka perlu ada pemeriksaan keabsahan data. Untuk memastikan keabsahan data sebagai karya ilmiah yang kredibel, penelitian ini mengadopsi kerangka keabsahan kualitatif dari Lincoln dan Guba (1985), yang mencakup empat kriteria: kredibilitas (kepercayaan terhadap temuan), transferabilitas (relevansi temuan di konteks lain), dependabilitas (konsistensi proses penelitian), dan konfirmabilitas (objektivitas temuan). Strategi seperti triangulasi, member check, dan dokumentasi transparan diterapkan untuk memenuhi kriteria ini, memastikan bahwa hasil penelitian tentang manajemen penganggaran pendidikan nasional dapat dipercaya dan relevan.

1. Kredibilitas data

Kredibilitas data dalam penelitian manajemen penganggaran pendidikan nasional, khususnya studi kasus alokasi 20% dana pendidikan dalam APBN, merupakan aspek penting untuk memastikan validitas dan keandalan temuan. Untuk mencapai kredibilitas, penelitian ini menerapkan berbagai strategi, seperti:

- a. Triangulasi data, yang mencakup perbandingan data dari berbagai sumber, seperti dokumen resmi pemerintah, hasil wawancara dengan pemangku kebijakan, dan pemikiran peneliti dan para ahli yang dirujuk dalam teori dan konsep.

- b. Member check, di mana hasil analisis awal dibagikan kepada narasumber utama untuk mendapatkan konfirmasi terkait keakuratan interpretasi data.
- c. Ketekunan pengamatan, dengan mendalami konteks kebijakan penganggaran, tantangan implementasi, serta dampaknya terhadap sektor pendidikan.

2. Transferibilitas data

Transferabilitas data dalam penelitian manajemen penganggaran pendidikan nasional, khususnya studi kasus alokasi 20% dana pendidikan dalam APBN, mengacu pada sejauh mana temuan penelitian ini dapat diterapkan atau relevan dalam konteks lain. Untuk memastikan transferabilitas, penelitian ini mendokumentasikan secara rinci seluruh proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data, termasuk latar belakang kebijakan, metode yang digunakan, serta kondisi sosial dan ekonomi yang memengaruhi implementasi anggaran pendidikan.

3. Dependabilitas Data

Dependabilitas data dalam penelitian ini berfokus pada konsistensi dan keandalan proses penelitian sehingga hasil yang diperoleh dapat diulang atau diverifikasi dalam kondisi yang serupa. Untuk memastikan dependabilitas, penelitian ini menerapkan prosedur yang transparan dan terstruktur dalam setiap tahap, mulai dari pengumpulan data, reduksi, hingga analisis. Setiap langkah didokumentasikan secara rinci, termasuk sumber data, metode analisis, dan alat yang digunakan, seperti wawancara mendalam, analisis dokumen resmi, serta triangulasi data.

4. Konfirmabilitas Data

Konfirmabilitas data dalam penelitian manajemen penganggaran pendidikan nasional, khususnya studi kasus alokasi 20% dana pendidikan dalam APBN, bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar didasarkan pada data yang diperoleh, bukan pada bias atau asumsi

peneliti. Dalam penelitian ini, konfirmabilitas dicapai dengan menerapkan dokumentasi yang transparan dan sistematis terhadap seluruh tahapan penelitian, mulai dari pengumpulan hingga analisis data. Peneliti menyediakan catatan wawancara, transkrip, dokumen yang dianalisis, serta catatan analitis yang digunakan dalam interpretasi temuan. Proses ini memungkinkan pihak eksternal, seperti *peer reviewer* atau pakar kebijakan, untuk menilai keabsahan temuan. Peneliti juga melakukan triangulasi data, dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, seperti laporan pemerintah, hasil wawancara, dan data statistik, untuk memastikan konsistensi dan keakuratan temuan.